

Tantangan Dan Peluang Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sinjai

Muhammad Lutfi¹, Mursak², Muhlis Hajar Adiputra³, Fitriani⁴

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: lutfigov@gmail.com; mursak.ucca@gmail.com; muhlis.h.adiputra@gmail.com; fitrifitriani2909@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the challenges and opportunities of e-government implementation in improving transparency and accountability in village governance in Sinjai Regency. The research employed a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and Focus Group Discussions (FGD), and analyzed using N-Vivo software. The findings indicate that e-government adoption in villages in Sinjai Regency remains at an early to intermediate stage. Implementation is largely dominated by mandatory applications such as SISKEUDES and SIPADES, along with the use of village websites and social media for information dissemination. The implementation has positively contributed to greater transparency in financial management and village programs, as well as strengthened administrative accountability and public trust. However, several challenges persist, including limited digital infrastructure, low human resource capacity, resistance to change, and budget constraints. Nevertheless, opportunities remain through service system integration, capacity building for village officials and communities, and stronger policy support from the local government. Strengthening these aspects is essential to achieve transparent, accountable, and responsive village governance.*

Keywords: *e-government, transparency, accountability, village governance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dan peluang implementasi e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD), kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak N-Vivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government di desa-desa Kabupaten Sinjai masih berada pada tahap awal hingga menengah. Implementasi didominasi oleh penggunaan aplikasi wajib seperti SISKEUDES dan SIPADES, serta pemanfaatan website desa dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi. Penerapan ini berdampak positif terhadap peningkatan keterbukaan informasi keuangan dan program desa, serta memperkuat akuntabilitas administratif dan kepercayaan masyarakat. Namun, implementasi e-government masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan anggaran. Di sisi lain, terdapat peluang pengembangan melalui integrasi sistem layanan, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Penguatan aspek tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Kata kunci: e-government, transparansi, akuntabilitas, pemerintahan desa

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* Muhammad Lutfi: Email: lutfigov@gmail.com

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilandasi oleh adanya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya *e-government* untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, menuju penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip ekonomi berbiaya ringan. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini pemanfaatan *e-government* dalam pengelolaan pemerintahan desa di Kabupaten Sinjai masih terbatas. Di mana penggunaan teknologi informasi masih terbatas pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang seragam dari pemerintah pusat, sementara pada aspek lain seperti dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan belum banyak dilakukan. Padahal pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan terdepan, memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan pembangunan nasional (Rioska Restoe, 2014), sehingga pemerintah desa penting untuk dikuatkan dalam berbagai sektor (Wang, 2022). Salah satu penguatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pengelolaan pemerintahan desa adalah pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan (*e-government*).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal mutlak untuk dilaksanakan di era sekarang ini. Perkembangan teknologi yang dibarengi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, sejatinya direspon oleh pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi penting, agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik serta dalam rangka pelayanan yang prima dan maksimal kepada warga masyarakat (Juliarto, 2019). Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan (*e-government*) akan memudahkan pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat, dan masyarakat pun mudah mengakses apa yang menjadi program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka (Manoharan & Ingrams, 2018). Selain itu, *e-government* juga dapat digunakan untuk memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan (Sukarno & Nurmandi, 2023). Di antara kelebihan dari pemanfaatan *e-government* tersebut adalah dapat menjamin akuntabilitas dan transparansi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik (Chohan et al., 2020). Sementara bagi warga masyarakat, dengan pemanfaatan *e-government* tersebut akan memudahkan akses untuk mendapatkan layanan dari pemerintah (E. Dobrolyubova, E. Klochkova, 2019). Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan publik secara signifikan, memperkuat kualitas layanan, dan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Lutfi & Niswaty, 2024). Implementasi *e-government* dalam meningkatkan transparansi pemerintahan memberikan dampak besar terhadap pengelolaan data dan informasi publik (Mukarromah, N.; Pratiwi, A; Listiani, 2024). Sementara dengan *e-government*, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengelolaan anggaran dan program-program yang sedang berlangsung, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengawasi kinerja pemerintah (Bao et al., 2024).

Fenomena pemanfaatan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bukanlah hal baru dalam konteks pemerintahan, bahkan diasumsikan perkembangan dan kemajuan suatu negara berangkat dari adanya inisiatif dan

implementasi reformasi birokrasi yang berbasis *Information Communication Technology* (ICT) (Indrajit, 2006). Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa pemanfaatan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pendekatan ICT dilakukan sebagai upaya untuk berdaya saing secara global (Schütte, 2015). Demikian pesatnya penyebaran media aplikasi media sosial yang awalnya hanya sekedar alat yang digunakan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya, namun saat ini media sosial menjadi kanal yang sangat penting di seluruh level pemerintahan, *civil society* dan dunia usaha (Mergel & Bretschneider, 2013).

Orientasi *e-government* adalah berupaya membentuk jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi waktu dan lokasi/ efisien, biaya terjangkau/ efektif dan sangat terbuka untuk semua elemen masyarakat/ transparansi (Ventura et al., 2023), pembentukan hubungan secara interaktif dengan dunia usaha (Justine Weinstein, 2018), pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas publik untuk berinteraksi dengan pemerintah (Supardal, 2016), pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah (Nurmandi, A., Almarez, D., Roengtam, S., Salahudin, Jovita, H. D., Kusuma Dewi, D. S., & Efendi, 2018).

E-government sebagai bentuk terjadinya afiliasi antara ICT dengan kultur sosial baik secara internal maupun eksternal, karena adanya relasi antara pemerintah dengan masyarakat melalui sistem informasi (Mergel & Bretschneider, 2013). Eksistensi *e-government* sangat penting dalam memperkuat interaksi antara pemerintah dan warganya, di saat yang sama terjadi simbiosis mutualisme artinya pemerintah memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan kebijakan dan masyarakat membutuhkan akses untuk memperoleh informasi dan menilai kebijakan yang ada (Nah & Yamamoto, 2017). Sehingga esensi *e-government* tentunya bukan semata menggunakan internet atau website, namun di dalamnya ada aspek sosial, politik, kultur, ekonomi dan hukum yang sangat kompleks dan menjadi perhatian diseluruh elemen baik pemerintah, swasta maupun para cendekia multidisiplin (Lestari, 2014).

Penelitian ini sangat urgen dan menarik untuk dilakukan, untuk mengidentifikasi dan mengetahui tantangan dan peluang penerapan *e-government* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Kabupaten Sinjai. Dengan identifikasi dan pengetahuan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, maka penelitian ini akan dapat menjadi referensi dan landasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pengembangan pengelolaan pemerintahan berbasis *e-government*, serta dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Selain itu, dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi, maka pelibatan seluruh pihak dalam mengatasi permasalahan terkait akan mudah dilakukan. Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi sangat efektif untuk keberhasilan strategi ini. Pemerintah daerah dapat menyediakan dukungan kebijakan atau regulasi dan anggaran yang memadai. Pemerintah dan masyarakat desa sebagai pelaku dan sasaran kebijakan, perlu dilibatkan dalam setiap tahapan kebijakan untuk dapat memastikan bahwa kebijakan dan solusi yang telah dituangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang sebenarnya. Sementara pihak swasta dan akademisi dapat berperan

melalui dukungan teknologi, riset serta dukungan pendanaan. Dengan adanya kolaborasi dari seluruh pihak, maka tantangan dan peluang dalam penerapan *e-government* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Kabupaten Sinjai akan dapat diatasi, sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, akuntabel dan transparan di Kabupaten Sinjai.

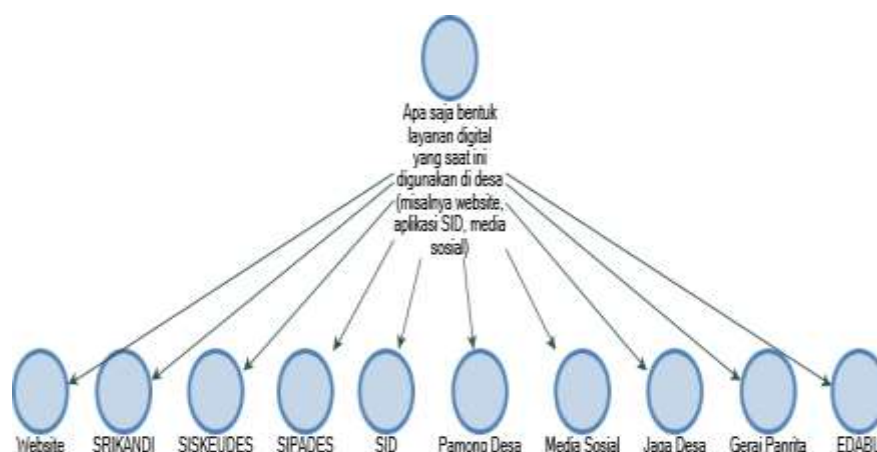
METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode dan pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait tantangan dan peluang dalam implementasi *e-government* di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Informan kunci yang akan diwawancarai adalah pemerintah desa di Kabupaten Sinjai yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai. Observasi langsung di lapangan akan dilakukan untuk mendapatkan data dan pemahaman yang mendalam dan holistik terkait fenomena penelitian, serta mengumpulkan data-data tertentu dari dokumen-dokumen yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap data penelitian. Selain itu, FGD dilakukan dengan berbagai pihak yang memahami permasalahan penelitian agar mendapatkan gambaran utuh dan data yang komprehensif dan sistematis. Untuk mendapatkan visualisasi data yang sistematis dan komprehensif, maka data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan alat bantu analisis berupa *Software N-Vivo*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Adopsi dan Bentuk Implementasi e-Government di Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sejumlah desa di Kabupaten Sinjai, mayoritas desa telah mulai menerapkan e-Government, meskipun tingkat dan bentuk adopsinya bervariasi. Hasil olahan data melalui aplikasi N-Vivo menunjukkan bahwa ada 10 (sepuluh) jenis layanan digital yang paling umum digunakan saat ini di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sinjai, seperti nampak pada gambar berikut:



Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana pada data di atas, dilaksanakan secara bervariasi oleh

pemerintah desa di Kabupaten Sinjai. Adapun pemanfaatan dari beberapa aplikasi tersebut adalah:

- Website desa sebagai portal informasi utama.
- Aplikasi SISKEUDES untuk pengelolaan keuangan desa.
- SIPADES untuk manajemen aset desa.
- SRIKANDI/Tanda Tangan Elektronik untuk penandatanganan berkas secara elektronik.
- Media sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram) untuk komunikasi dan penyebaran informasi.
- Aplikasi pelayanan surat menyurat serta layanan perizinan digital (Gerai Panrita).

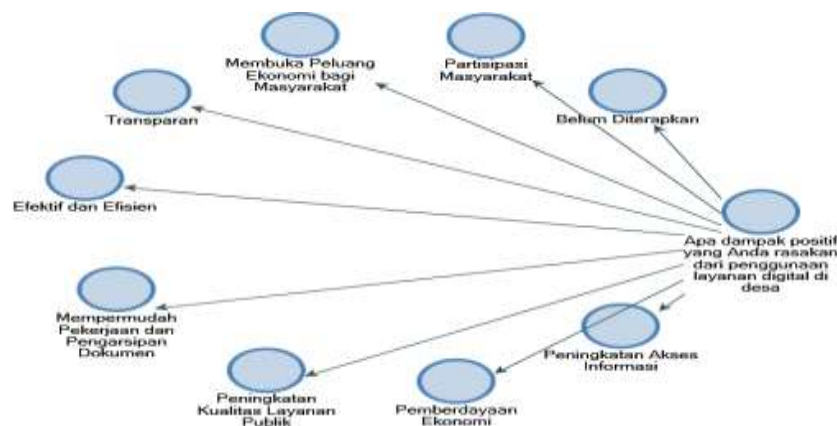
Sebagian desa juga mulai menggunakan sistem informasi desa (SID) dan aplikasi lain yang relevan dengan kebutuhan lokal. Walaupun masih terdapat pula desa yang belum menerapkan layanan digital secara utuh, dengan alasan keterbatasan sumber daya maupun infrastruktur. Namun demikian, pemanfaatan E-Government berkontribusi signifikan dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, menjadi wadah utama untuk menyampaikan informasi terkait program desa, kegiatan pembangunan, data desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa adopsi e-Government di desa-desa Kabupaten Sinjai berada pada tahap awal hingga menengah (*early-intermediate stage*). Hal ini ditandai dengan dominasi penggunaan aplikasi yang bersifat wajib dan terstandar secara nasional, seperti SISKEUDES dan SIPADES, dibandingkan aplikasi yang bersifat inovatif dan berbasis kebutuhan lokal. Secara analitis, pola ini menunjukkan bahwa implementasi e-Government di tingkat desa masih bersifat *compliance-based adoption*, yaitu adopsi teknologi yang didorong oleh kewajiban regulatif dari pemerintah pusat maupun daerah, bukan sepenuhnya lahir dari kebutuhan internal desa. Website desa dan media sosial lebih banyak difungsikan sebagai media diseminasi informasi satu arah, belum sepenuhnya menjadi ruang interaksi partisipatif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa e-Government di desa belum berkembang ke tahap transformational e-Government, melainkan masih berada pada tahap *informational dan transactional*. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan desa, minimnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, serta belum adanya roadmap pengembangan e-Government desa yang terintegrasi di tingkat kabupaten. Namun demikian, variasi adopsi antar desa juga memperlihatkan adanya potensi inovasi lokal, khususnya pada desa-desa yang memiliki kepemimpinan desa yang adaptif dan dukungan infrastruktur yang relatif lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa faktor kepemimpinan dan konteks lokal memiliki peran penting dalam mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan desa.

Dampak Implementasi e-Government terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan e-Government secara umum dinilai memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa, memberikan dampak yang besar, baik terhadap pemerintah desa maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil olahan data penelitian menunjukkan beberapa manfaat yang dirasakan, yakni sebagai berikut:



Dari gambar tersebut menunjukkan berbagai manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat desa, yaitu:

- Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan dana desa, pelaporan keuangan, serta pelaksanaan program dan kegiatan.
- Mempermudah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran melalui aplikasi SISKEUDES yang terintegrasi dan dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk admin kabupaten.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa karena masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangan dan kebijakan desa melalui media digital.
- Efisiensi dan efektivitas layanan publik meningkat, baik dalam aspek administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut memperkuat studi sebelumnya yang juga mendukung temuan ini, bahwa implementasi dan pemanfaatan e-Government mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Berdasarkan hasil pengkodean tematik N-Vivo, transparansi dan akuntabilitas muncul sebagai dua tema dominan yang paling sering disebut oleh informan. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa e-Government telah berfungsi sebagai instrumen tata kelola (*governance tools*) yang memperkuat mekanisme kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Transparansi mengalami peningkatan terutama melalui keterbukaan informasi keuangan dan program desa. Publikasi APBDes, realisasi anggaran, dan kegiatan pembangunan melalui website desa dan media sosial menciptakan akses informasi yang lebih simetris antara pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi ini secara tidak langsung menurunkan potensi asimetri informasi yang selama ini menjadi sumber lemahnya pengawasan publik di tingkat desa.

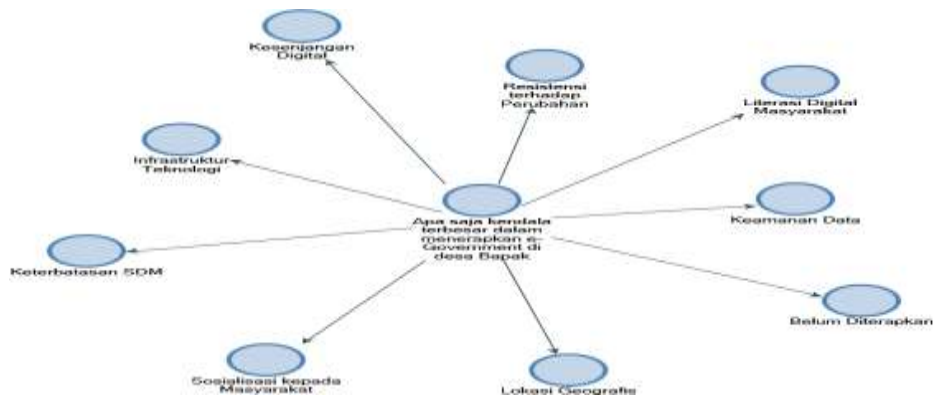
Dari sisi akuntabilitas, penggunaan aplikasi SISKEUDES memperkuat mekanisme pertanggungjawaban administratif dan vertikal, khususnya kepada pemerintah kabupaten. Sistem digital meminimalisir praktik manipulasi data, meningkatkan ketertiban administrasi, serta mempermudah proses audit dan monitoring.

Dengan demikian, e-Government tidak hanya memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat (*horizontal accountability*), tetapi juga kepada pemerintah di atasnya (*vertical accountability*).

Namun, secara kritis dapat dicatat bahwa peningkatan transparansi belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan informasi. Artinya, keterbukaan informasi belum selalu berbanding lurus dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa e-Government perlu disertai dengan strategi literasi digital dan pemberdayaan masyarakat agar manfaat transparansi dapat dirasakan secara optimal.

Tantangan dan Hambatan Implementasi e-Government

Meskipun manfaatnya nyata, implementasi e-Government di desa-desa Kabupaten Sinjai masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Kondisi desa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, menimbulkan berbagai macam kendala dalam penerapan e-government. Berdasarkan olahan data hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala tersebut, seperti nampak pada gambar berikut:



1. Keterbatasan Infrastruktur Digital
 - Banyak desa mengalami kendala akses internet yang tidak stabil, kualitas jaringan buruk, dan perangkat komputer yang terbatas.
 - Kesenjangan infrastruktur antara desa dan perkotaan cukup signifikan.
2. Rendahnya Literasi Digital dan SDM
 - Tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan teknis memadai dalam pengelolaan sistem digital.
 - Pelatihan sudah pernah dilakukan, namun belum merata dan intensitasnya perlu ditingkatkan.
 - Sebagian masyarakat, khususnya usia lanjut, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital.
3. Resistensi terhadap Perubahan dan Keamanan Data
 - Masih terdapat resistensi dan kekhawatiran terkait keamanan data serta privasi dalam penggunaan layanan digital.
 - Proses adaptasi budaya digital membutuhkan waktu dan sosialisasi berkelanjutan.
4. Biaya Implementasi dan Keterbatasan Anggaran. Implementasi e-Government memerlukan investasi awal yang relatif besar, terutama untuk infrastruktur dan pelatihan.

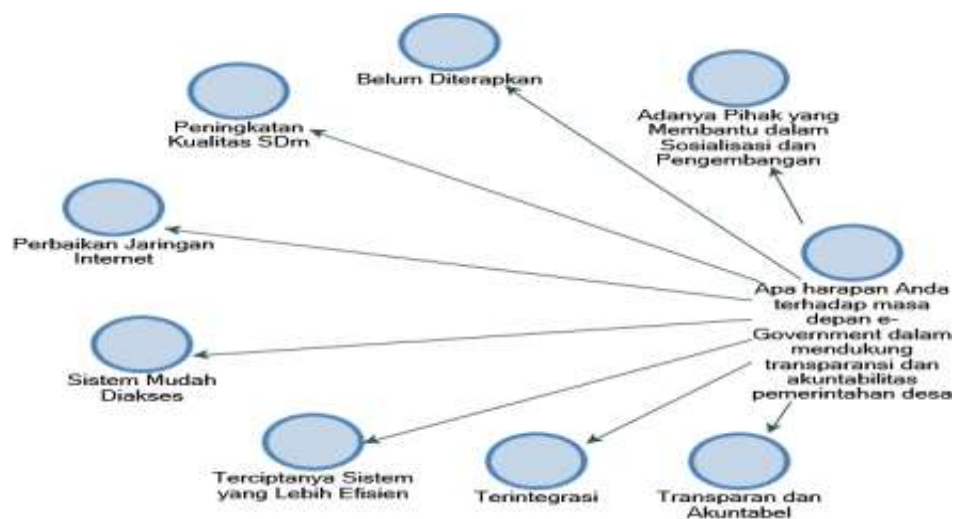
Analisis data di atas menunjukkan bahwa tantangan implementasi e-Government di desa bersifat *multidimensional*, mencakup aspek struktural, teknis, dan kultural.

Keterbatasan infrastruktur digital menjadi faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas implementasi, khususnya pada desa-desa yang berada di wilayah geografis sulit dijangkau. Rendahnya literasi digital aparatur desa mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas institusional antara tuntutan digitalisasi dan kemampuan aktual SDM desa. Pelatihan yang bersifat sporadis dan belum berkelanjutan menyebabkan transfer pengetahuan teknologi tidak berlangsung secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan tingginya beban kerja perangkat desa yang membuat pengelolaan sistem digital sering kali tidak menjadi prioritas utama.

Dari sisi kultural, resistensi terhadap perubahan menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kekhawatiran terhadap keamanan data dan kesalahan teknis menandakan masih rendahnya kepercayaan terhadap sistem digital. Secara anggaran, keterbatasan pendanaan memperlihatkan bahwa e-Government belum sepenuhnya diposisikan sebagai investasi strategis jangka panjang, melainkan masih dianggap sebagai biaya tambahan. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan anggaran desa dan dukungan fiskal dari pemerintah daerah.

Peluang dan Harapan Pengembangan e-Government

Sesuai hasil penelitian dan temuan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penerapan e-government pada pemerintahan desa telah membawa manfaat dan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Sinjai. Namun, di balik itu, sejumlah kendala dan tantangan masih dihadapi dalam penerapan dan pemanfaatannya. Oleh karenanya, peneliti kemudian mengkonfirmasi kepada para informan apa yang menjadi harapan ke depannya terkait hal ini. Di mana sebagian besar informan mengekspresikan harapan besar terhadap pengembangan sistem e-Government di masa mendatang, seperti nampak pada hasil olahan data berikut ini:



- Integrasi sistem pelayanan publik agar seluruh layanan desa dapat diakses dalam satu platform digital yang mudah digunakan.
- Peningkatan kualitas infrastruktur (internet dan perangkat) hingga ke wilayah terpencil.

- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan.
- Dukungan pemerintah daerah/provinsi baik dalam bentuk regulasi, anggaran, maupun penguatan ekosistem digital desa.
- Pemanfaatan teknologi lanjutan seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi untuk pelayanan yang lebih efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di balik berbagai tantangan, terdapat peluang besar dalam pengembangan e-Government desa di Kabupaten Sinjai. Harapan informan terhadap integrasi sistem pelayanan mencerminkan kebutuhan akan ekosistem digital desa yang terkoordinasi, bukan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri (*silo system*). Peluang pengembangan e-Government juga diperkuat oleh adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pemerintahan, meskipun masih memerlukan penguatan regulasi teknis dan kebijakan operasional. Dukungan lintas sektor, khususnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pihak swasta, membuka ruang bagi pengembangan inovasi digital desa yang berbasis kebutuhan lokal.

Secara strategis, e-Government desa di Kabupaten Sinjai berpotensi diarahkan menuju model *smart village governance*, di mana teknologi tidak hanya digunakan untuk administrasi, tetapi juga untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik adaptif, dan penguatan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi lanjutan seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat menjadi agenda jangka panjang yang realistis apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur dan SDM. Dengan demikian, e-Government tidak hanya dipahami sebagai alat teknis, tetapi sebagai strategi transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian ini juga mengafirmasi literatur global dan nasional bahwa e-Government berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola desa. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, dan dukungan lintas sektor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tantangan dan peluang implementasi e-Government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Kabupaten Sinjai, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat adopsi e-Government di pemerintahan desa Kabupaten Sinjai telah berlangsung, namun masih berada pada tahap awal hingga menengah. Implementasi e-Government didominasi oleh pemanfaatan aplikasi yang bersifat wajib dan terstandar secara nasional, seperti SISKEUDES dan SIPADES, serta penggunaan website desa dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi. Inovasi digital berbasis kebutuhan lokal desa masih terbatas dan belum terintegrasi dalam satu sistem pelayanan yang komprehensif.
2. Implementasi e-Government memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pemanfaatan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan, program, dan kegiatan pembangunan. Di sisi lain, sistem digital juga memperkuat mekanisme pertanggungjawaban administrasi pemerintah desa kepada pemerintah daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Tantangan utama implementasi e-Government di desa bersifat struktural, teknis, dan kultural. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi dan kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi e-Government. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan budaya kerja.
4. Terdapat peluang besar untuk pengembangan e-Government desa di Kabupaten Sinjai. Dukungan kebijakan pemerintah daerah, harapan masyarakat dan aparatur desa terhadap layanan digital yang terintegrasi, serta potensi kolaborasi lintas sektor membuka ruang pengembangan e-Government menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

REFERENSI

- Bao, B., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2024). *E-Government Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan*. 4(1), 8013–8024.
- Chohan, S. R., Hu, G., Si, W., & Pasha, A. T. (2020). Synthesizing e-government maturity model: a public value paradigm towards digital Pakistan. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(3), 495–522. <https://doi.org/10.1108/TG-11-2019-0110>
- E. Dobrolyubova, E. Klochkova, O. A. (2019). Digitalization and Effective Government: What Is the Cause and What Is the Effect? *International Conference on Digital Transformation and Global Society*, 55–67. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37858-5_5
- Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. *E- Government*, XIX, 91.
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1417>
- Justine Weinstein, T. (2018). State Bureaucratic Undermining. *The University of Chicago Law Review*, 5(85), 1083–1138. <https://doi.org/10.2307/26486818>
- Lestari, I. S. J. Y. M. (2014). Understanding Citizen Participation In Governmental Social Media : A Case Study Of The Indonesian Regional Police. *Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS)*, 118.
- Lutfi, M., & Niswaty, R. (2024). *Policy Recommendations Based On the Evolution of Studies on E- Government and Public Services : A Bibliometric Analysis*. 1(3), 105–116.
- Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. *State and Local Government Review*, 50(1), 56–66. <https://doi.org/10.1177/0160323x18763964>
- Mergel, I., & Bretschneider, S. I. (2013). A Three-Stage Adoption Process for Social Media Use in Government. *Public Administration Review*, 73(3), 390–400. <https://doi.org/10.1111/puar.12021>
- Mukarromah, N.; Pratiwi, A; Listiani, S. E. . & H. (2024). *Implementasi Kebijakan E-Government dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan*. 7(November), 64–72.

- Nah, S., & Yamamoto, M. (2017). Civic Technology and Community Building: Interaction Effects Between Integrated Connectedness to a Storytelling Network (ICSN) and Internet and Mobile Uses on Civic Participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 22(4), 179–195. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12189>
- Nurmandi, A., Almarez, D., Roengtam, S., Salahudin, Jovita, H. D., Kusuma Dewi, D. S., & Efendi, D. (2018). To what extent is social media used in city government policy making? Case studies in three asean cities. *Public Policy and Administration*, 17(4), 600–618. <https://doi.org/10.13165/VPA-18-17-4-08>
- Rioska Restoe, I. M. F. (2014). *Kerjasama Pemerintah Desa Kemiri dengan Polresta Sidoarjo dalam Mewujudkan Kampung Tertib Lalu Lintas Rioska Restoe Irsyadillah Muhammad Farid Ma ' ruf*. 101–110.
- Schütte, S. A. (2015). Keeping the New Broom Clean: Lessons in Human Resource Management from the KPK. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 171, 423–454. <https://doi.org/10.1163/22134379-17104001>
- Sukarno, M., & Nurmandi, A. (2023). *E-Government Development Index Impact on World Governance Indicator Index in Southeast Asian Countries*. 4(April), 97–114.
- Supardal, S. (2016). Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 120. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i2.272>
- Ventura, P., Beatriz, A., & Mion, Z. (2023). *A percepção dos profissionais de saúde sobre a inserção de estudantes de medicina na Atenção Primária em Saúde : Uma revisão da literatura The perception of health professionals about the insertion of medical students in Primary Health Care : A literature review*. 2023, 1–13.
- Wang, X. (2022). Influencing Factors of Traditional Village Protection and Development from the Perspective of Resilience Theory Influencing Factors of Traditional Village Protection and Development from the Perspective of Resilience Theory. *Land*, 11(2314).